**PEMBERIAN ROYALTI ATAS COVER LAGU DI YOUTUBE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN ATAU MUSIK**

****

**SKRIPSI**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Edgar Adrian Saputra**

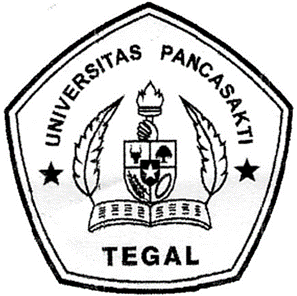
**5120600014**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

**PEMBERIAN ROYALTI ATAS COVER LAGU DI YOUTUBE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN ATAU MUSIK**

****

**SKRIPSI**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

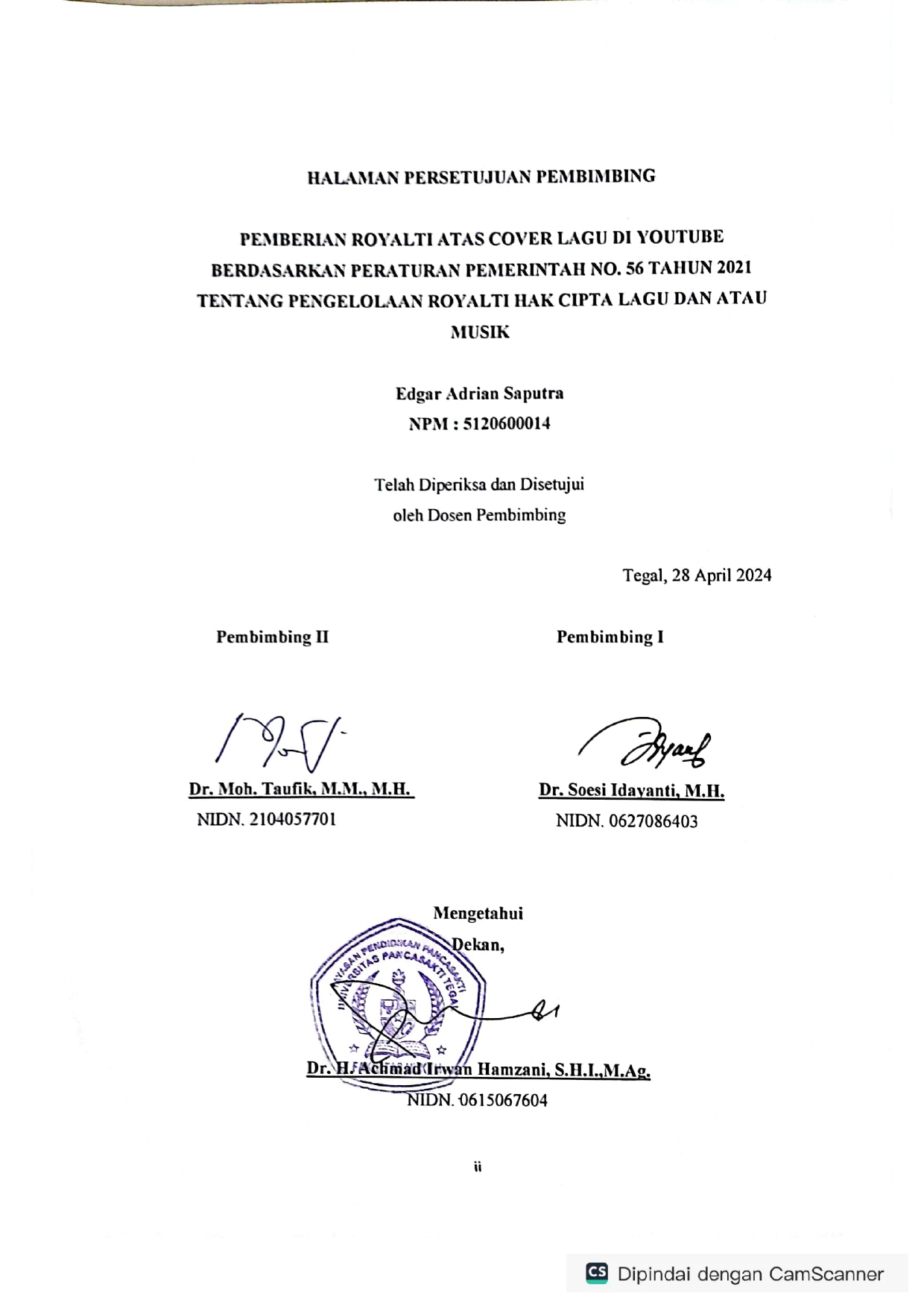
**Edgar Adrian Saputra**

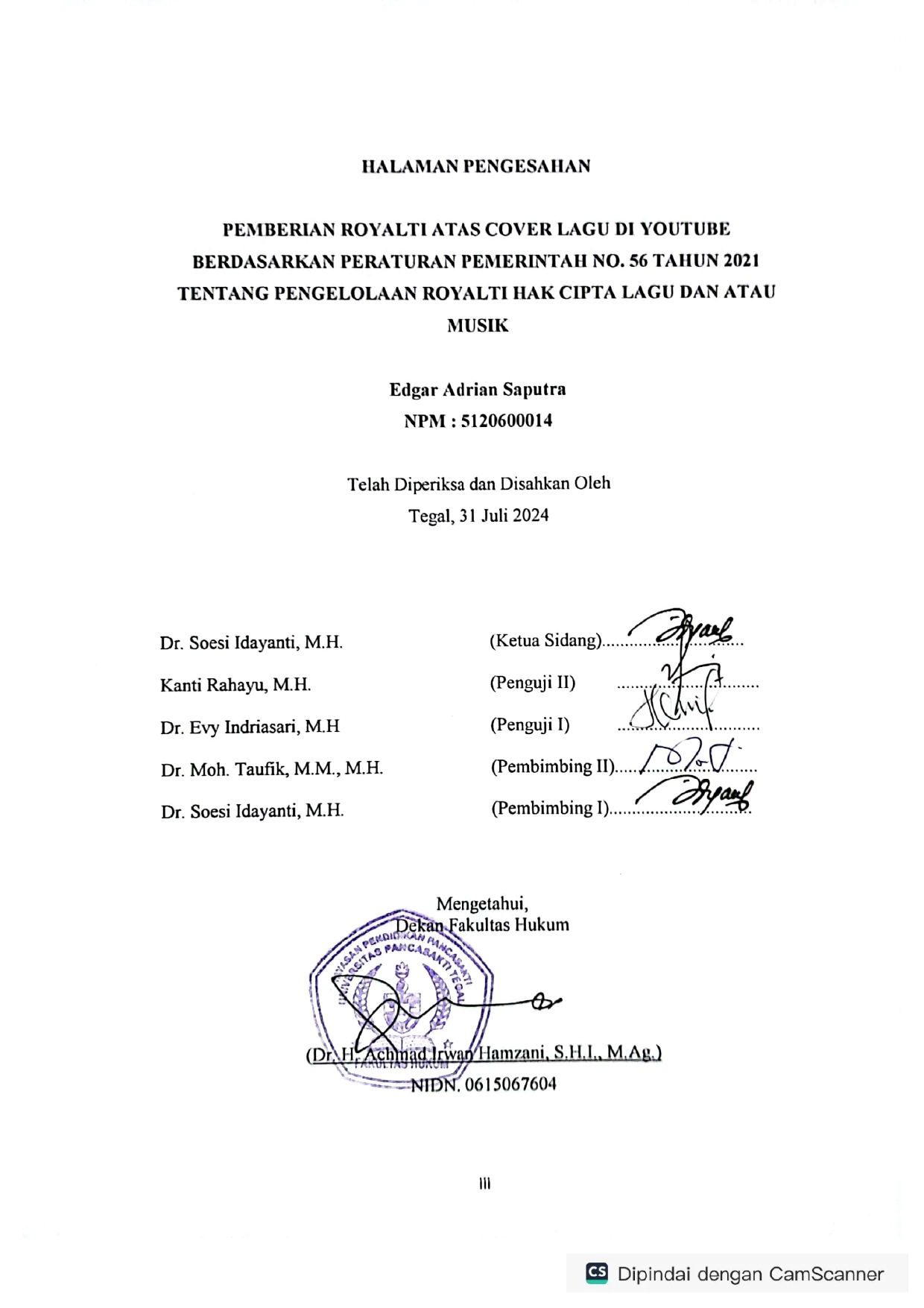
**5120600014**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

****

****

# 

# ABSTRAK

Perkembangan dunia digital khususnya Youtube semakin maju. Banyaknya cover lagu di Youtube membuat musisi memperhatikan royalti atas hak cipta lagu mereka. Royalti dibayarkan oleh seseorang yang menggunakan suatu hak cipta orang lain kepada pemilik hak cipta lagu. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengatur mengenai pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta lagu secara komersil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dari berbagai ketentuan Undang-Undang, mengumpulkan literatur, mencari informasi lewat internet, jurnal serta artikel. Sumber data sekunder yaitu data kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memperhatikan masalah pembayaran royalti atas cover lagu di Youtube. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 untuk mengatur pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta lagu. Namun dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara khusus hukum mengenai pembayaran royalti atas cover lagu yang diunggah pada Youtube. Sehingga perlu adanya pengembangan hukum yang menjelaskan lebih detail untuk mengatasi kasus royalti hak cipta lagu pada media digital.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci**: Cover Lagu, Royalti, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021

# *ABSTRACT*

*The development of the digital world, especially YouTube, is increasingly advanced. The large number of song covers on YouTube makes musicians pay attention to royalties for their song copyrights. Royalties are paid by someone who uses someone else's copyright to the owner of the song copyright. Government Regulation no. 56 of 2021 regulates the payment of royalties for commercial use of song copyrights.*

*This research uses a type of library research. The data collection method used in this research is by collecting data from various provisions of the law, collecting literature, searching for information via the internet, journals and articles. Secondary data sources are library data.*

*The results of this research show that the government has paid attention to the issue of paying royalties for song covers on YouTube. The government issued Government Regulation no. 56 of 2021 to regulate royalty payments for the use of song copyrights. However, this regulation does not specifically explain the law regarding the payment of royalties for song covers uploaded to YouTube. So there is a need to develop laws that explain in more detail to resolve cases of song copyright royalties on digital media.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords****: Song Cover, Royalties, Government Regulation no. 56 of 2021*

# PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Munadi dan Ibu Ega Riesnawati, Mbah Kakung dan Mbah Uti serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan baik secara morill maupun materil.

2. Adik tercinta Zizi.

3. Kekasih hati Asryilah Rachmani, yang setia menemani dan mendukung.

4. Teman seperjuangan kelas E Perdata

5. Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022.

6. Dosen pembimbing (Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.)

7. Dosen penguji (Ibu Evy Indriasari, M.H dan Ibu Kanti Rahayu, M. H)

# MOTTO

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”**

**(Q.S Ar-Ra’d: 11)**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *allhamdulilah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt., sebagai amal shalih.
7. Kedua orang tua tercinta, terutama Bapak Munadi dan Ibu Ega yang selalu memberikan do’a, dukungan, nasihat, motivasi, serta pengorbannya inilah yang menjadikan alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu diberikan panjang umur kepada Bapak dan Ibu diberikan tempat yang terbaik.

**DAFTAR ISI**

[**PERSETUJUAN PEMBIMBING i**](#_Toc31399)

[**PENGESAHAN ii**](#_Toc13701)

[**PERNYATAAN iii**](#_Toc30110)

[**ABSTRAK iv**](#_Toc28460)

[**ABSTRACT v**](#_Toc28966)

[**PERSEMBAHAN vi**](#_Toc2746)

[**MOTTO vii**](#_Toc23845)

[**KATA PENGANTAR viii**](#_Toc20324)

[**BAB I**](#_Toc10068) [**PENDAHULUAN 1**](#_Toc4587)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc16282)

[B. Rumusan Masalah 11](#_Toc24610)

[C. Tujuan Penelitian 11](#_Toc27644)

[D. Urgensi Penelitian 11](#_Toc395)

[E. Tinjauan Pustaka 12](#_Toc20796)

[F. Metode Penelitian 16](#_Toc15870)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 19](#_Toc22554)

[**BAB II**](#_Toc27724) [**TINJAUAN KONSEPTUAL 22**](#_Toc2290)

[A. Tinjauan tentang Hak Cipta 22](#_Toc2526)

[B. Tinjauan tentang Royalti 35](#_Toc28659)

[1. Definisi Royalti 35](#_Toc31444)

[2. Hukum yang Membahas Pembayaran Royalti 39](#_Toc31677)

[3. Perjanjian yang Mendasari Penerapan Royalti 40](#_Toc18832)

[4. Keterkaitan Royalti dengan Hak Cipta 42](#_Toc3806)

[5. Royalti Hak Cipta pada Media Elektronik 43](#_Toc4429)

[6. Penentuan Royalti Elektronik 44](#_Toc28197)

[C. Tinjauan tentang Media Elektronik 51](#_Toc24181)

[1. Definisi Media Elektronik 51](#_Toc7657)

[2. Definisi Media Sosial 54](#_Toc1237)

[3. Dampak Positif Penggunaan Media Eletronik 57](#_Toc7404)

[4. Dampak Negatif Penggunaan Media Elektronik 59](#_Toc30729)

[**BAB III**](#_Toc7864)[**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62**](#_Toc23558)

[A. Mekanisme Pemberian Royalti atas Cover Lagu di Youtube Menurut PP No. 56 Tahun 2021 62](#_Toc17344)

[B. Dampak Hukum Terhadap Penerapan PP No. 56 Tahun 2021 pada Pemberian Royalti atas Cover Lagu di Youtube. 73](#_Toc21141)

[**BAB IV**](#_Toc9533) [**PENUTUP 87**](#_Toc31805)

[A. Simpulan 87](#_Toc25864)

[B. Saran 88](#_Toc4405)

[**DAFTAR PUSTAKA 89**](#_Toc2353)

[**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93**](#_Toc10539)

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Upaya Hukum Preventif 73

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Era teknologi yang terjadi di dunia saat ini memberi pengaruh kepada Indonesia. Kemajuan teknologi dirasakan di berbagai bidang di Indonesia. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak pada mata pencaharian baru atau pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya atau mungkin sudah ada namun saat ini lebih banyak kombinasi yang dilakukan dengan berbagai basis teknologi yang lebih modern. Salah satu kemajuan yang dirasakan Indonesia adalah di bidang musik. Musik Indonesia sedang berada di fase viral di social media baik Instagram, tiktok, youtube, twitter, spotify dan lain sebagainya.[[1]](#footnote-1)

Musik adalah alunan yang mengiringi lagu dengan irama yang sesuai sehingga sebuah lagu dapat dinikmati semua orang dengan rasa. Musik dan lagu adalah ciptaan seorang musisi. Musik juga dapat diartikan penyajian dalam bentuk bunyi yang dihasilkan manusia. Tiga bagan penting dari music yaitu bit, ritme dan harmoni. Gabungan dari ketiga hal tersebut akan menciptakan karya musik. Musik yang serasi dengan ketiga hal itu, hingga menjadi satu kesatuan yang padu dan harmoni dapat dikatakan mejadi musik yang baik. Bagian-bagian tersebut memiliki dampak yang tidak sama pada keberlangsungan hidup manusia. Tubuh dipengaruhi oleh bit, Jiwa dipengaruhi

1

oleh ritme, dan roh atau jiwa dipengaruhi oleh melodi. Musik mengiringi sebuah lagu sehingga lagu itu lebih memiliki rasa atau jiwa. Membuat musik tidak mudah butuh pemikiran dan kreatifitas seseorang. Oleh sebab itu hak cipta melindungi karya musik.[[2]](#footnote-2)

Menurut PP No. 56 Tahun 2021 menerangkan tentang hak cipta ialah hak khusus pencipta yang muncul otomatis ada didasarkan pada prinsip deklaratif setelah diwujudkannya dalam bentuk karya cipta yang nyata tanpa pengurangan batasan menurut pada regulasi aturan Undang-Undang. Seseorang membuat lagu berdasarkan imajinasi maupun kisah nyata kemudian dituangkan kedalam syair-syair yang nantinya akan dinyanyikan. Karya cipta lagu adalah suatu seni sastra yang berisi kombinasi nada, suara yang diiringi oleh alat music dengan suatu kesatuan dan kesinambungan yang berirama serta selaras. Lagu dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspreksi jiwa dalam diri seseorang serta dapat mengobarkan semangat layaknya di jaman perjuangan, mempersatukan perbedaan, mengolah emosional dan rasa pada diri masing-masing orang dengan tujuan memperkuat perilaku maupun nilai yang dapat dirasakan seseorang di kemudian waktu menjadi sesuatu hal yang biasa, betul dan pas.[[3]](#footnote-3)

Youtube adalah salah satu media yang terdiri dari video-video. Video-video tersebut dapat berupa tips, tutor, hiburan dan lainnya. Informasi dalam bentuk video dapat memberikan pemahaman lebih cepat. Orang yang ingin mengupload video mereka maka harus memiliki akun terlebih dahulu. Youtube dikenal slogan: *Broadcast Yourself,* yaitu platform video yang di dalamnya terdapat berbagi informasi dalam bentuk audio-visual. Menyanyikan sebuah karya dalam rekaman baru yang dilakukan oleh seorang yang bukan merupakan penyanyi asli maupun seorang komposer sebenarnya dari suatu karya lagu. Orang yang menyanyikan lagu tersebut tidak memindahkan lirik serta lagu aslinya disebut cover lagu. Masyarakat mengcover lagu milik orang lain atau artis lalu dibuat video baru yang nuansanyapun juga baru & diupload ke social media berupa platform Youtube. Dalam mengcover lagu dapat dibuat bermacam-macam, yang dapat dilakukan secara simpel serta profesional.[[4]](#footnote-4)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak distingtif yang diterima oleh seseorang sebagai pemilik kekayaan intelektual dari Pemerintah. HKI dimaksudkan menjadi suatu bentuk penghargaan suatu karya cipta yang diciptakan oleh sang pemilik hingga memiliki wewenang atas penggunaan hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang dipergunakan atas hak milik pada setiap karya yang muncul sebagai akibat kreatifitas intelektual seseorang pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya hak ini membantu seseorang untuk dapat menjaga keorisinalan karya-karya yang telah dibuat sebelumnya. Karya yang disebutkan adalah kebendaan non wujud sebagai hasil dari ketrampilan atau kemampuan intelektual seseorang yang tercipta dengan bentuk cipta, rasa, serta nilai moral dan ekonomi.

Laporan yang dikutip pada *We Are Social*, menyebutkan bahwa ada 2,56 miliar pengguna platform sampai dengan Januari 2022. Pengguna Youtube terbesar di dunia, yakni India dengan 467 juta pengguna. Setelah itu menyusul 240 juta pengguna dari Amerika Serikat.  Sedangkan Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan 127.000.000 *user* media sosial Youtube. Pasaran Youtube di Indonesia tembus 21,42 persen pada bulan April tahun 2022, yaitu memiliki peringkat paling tinggi kedua dibawah media sosial Facebook.[[5]](#footnote-5) Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat konsumsi terhadap platform media sosial tersebut amat digandrungi di beberapa negara yang disebutkan.

Seiring berkembangnya Youtube dan lagu di Indonesia, ada beberapa oknum yang ingin menggandakan hasil karya cipta orang lain. *Property right* adalah karya baru yang tercipta secara eksklusif mendapat lindungan hukum, ekonomi serta moral. Jika hal demikian tidak mendapat perlindungan kemampuan intelektual, maka banyak pula okum-oknum penipu yang berusaha menghilangkan hasil kreatifitas para penemunya. Sanksi hukum yang ada belum mengatur peraturan mengani cover lagu. Kejadian ini cukup menjelaskan bahwa adanya fenomena tersebut merupakan salah satu faktor dari kurangnya perlindungan hukun terhadap pencipta lagu asli. Seseorang yang dengan sengaja menyanyikan ulang sebuah lagu namun tidak mengantongi izin dari pencipta lagu atau memberikan royalti pada pencipta aslinya.[[6]](#footnote-6) Royalti adalah suatu penghasilan yang didapatkan atas dasar kekayaan intelektual atau hak cipta dari karya yang dibuatnya. Royalti dibayarkan oleh pihak-pihak yang menggunakan karya cipta tersebut baik untuk didengarkan, di cover ulang, disebarluaskan, dinyanyikan ulang untuk tujuan tertentu. Setiap penampilan di depan umum mewajibkan pengguna menyerahkan fee royalti pada pemilik hak cipta dan lagu.[[7]](#footnote-7)

Pemberlakuan Auteurswet Tahun 1912 No. 600 bertepatan dengan pemberlakuan regulasi mengenai perlindungan karya cipta musik Indonesia yaitu zaman Hindia Belanda tanggal 23 September 1912. Tahun 1982 sesudah kemerdekaan Indonesia dibentuklah peraturan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang sifatnya nasional. Undang-Undang mengenai hak cipta terdapat beberapa kali revisi sampai pada dibentuknya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, karya musik diakui menjadi karya yang mendapat perlindungan hak cipta oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang. Setelah dilakukan perubahan beberapa kali, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan mengenai royalti dengan dibentuknya PP No. 56 Tahun 2021 guna mempertegas peraturan sebelumnya.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2020 menerangkan tentang hak cipta yaitu hak eksklusif milik pencipta yang muncul secara otomatis didasarkan pada prinsip deklaratif apabila suatu karya cipta selesai diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya pengurangan pembatasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan hak terkait ialah wewenang khusus untuk pihak produksi, pihak pertunjukan, pihak penyiaran atau fonogram dari hak cipta. Sesuai pasal 2 pada PP No. 16 Tahun 2020 Menteri mengadakan pencatatan serta peghapusan terhadap catatan karya cipta serta suatu produk hak terkait dengan permohonan. Sebelum dibahas mengenai royalti tentunya pencipta memohon pencatatan ciptaannya terlebih dahulu kepada Menteri. Dalam menentukan nominal royalti dan alur pemberian royalti yang disepakati maka diadakan Kontrak lisensi oleh pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait dengan pihak yang menerima lisensi. Oleh sebab itu, kerja sama penggunaan karya cipta dapat dilakukan tanpa menyalahi aturan.

Penjabaran PP No. 56 Tahun 2021 pasal 12 yaitu membahas tentang bahwasannya LMKN menarik royalti dari pihak-pihak yang memakai sebuah karya lagu yang telah didaftarkan ke LMK oleh pemilik hak cipta maupun hak terkait untuk kegiatan Komersil atau ditampilkan pada khalayak umum. Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2014 UU Hak Cipta, pada intinya apabila Pencipta tidak mendaftarkan karyanya kepada LMK maka ketika terjadi penggunaan manfaat dari sebuah karya musik oleh pihak lain maka LMKN tidak dapat menarik royalti. Namun jika adanya sengketa pada pengguna dan pemilik asli, LMK dapat membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

Pemerintah membentuk suatu lembaga sebagai tindak lanjut pemerintah terhadap pengelolaan royalti. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang resmi dibentuk pada tanggal 20 Januari 2015. Tugas pengelolaan royalti oleh LMKN diatur dalam UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat dua jenis Lembaga yang mengelola royalti di Indonesia yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Perbedaan antara keduanya ialah LMK merupakan Lembaga hukum nirlaba yang menerima amanat atau kuasa dari pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait untuk mengolah haknya seperti royalti untuk mengumpulkan dan menyalurkan. LMK dibagi menjadi delapan jenis lagi dengan 2 kelompok yaitu LMK Hak Cipta serta LMK Hak Terkait sesuai dengan SK dari Kemterian Hukum HAM RI. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa merasa kurang tegas dan kurang detail sehingga perlu dilakukannya perbaikan maupun penambahan regulasi hingga bisa mengatasi masalah yang melanggar hak cipta. Berdasar pada masalah tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mendetailkan penjelasan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu diresmikannya PP No.56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.[[9]](#footnote-9)

Permasalahan mengenai pembayaran royalti dirumuskan pada PP No. 56 Tahun 2021 diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi adanya tindakan yang melanggar hukum dan merugikan siapapun. Dalam PP No. 56 Tahun 2021 menerangkan perbedaan akses pengolahan bagi hak ekonomi pencipta, pihak yang membuat pementasan serta fonogram. Pementasan suatu karya cipta, warta karya cipta dan komunikasi karya cipta merupakan hal-hal yang dikelola oleh hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta. Sedangkan penyiaran maupun komunikasi pelaku pertunjukkan dikelola oleh Hak ekonomi Pelaku pertunjukan dan sedangkan penyediaan fonogram yang bisa diakses oleh umum dikelola oleh hak ekonomi produser fonogram.

Beberapa permasalahan cover lagu Youtube yang berujung pada kasus penuntutan hak royalti adalah kasus sang pengcover lagu, Tri Suaka dan Zidan. Tri Suaka dan Zidan pada awalnya mengcover lagu Andika Kangen Band dan menguploadnya dalam konten Youtubenya. Namun pada saat menyanyikan lagu tersebut keduanya dinilai terlalu melebih-lebihkan dan terkesan menghina gaya dan suara penyanyi asli. Banyaknya netizen yang menilai hal tersebut sudah tidak baik maka video tersebut viral dan sampai pada Andika Kangen Band selaku penyanyi asli. Pada awalnya Andika Kangen Band tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun untuk menghindari kejadian yang sama serta untuk menjadi pelajaran para penyanyi lain, maka melalui kuasa hukumnya Andika menindaklanjuti kasus tersebut. Tri suaka dan Zidan kerap kali manggung dan mengcover lagu-lagu milik Kangen Band tanpa membayar royalti. Selain itu Tri Suaka dan Zidan juga dituding tidak memiliki izin untuk membawakan tiap-tiap lagu milik Kangen Band. Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya, Andika menuntut permintaan maaf 3x24 jam. Apabila pihak keduanya tidak meminta maaf dan menanggapi somasi tersebut maka akan diancaman dengan membayar royalti sebesar Rp 1 Miliar. [[10]](#footnote-10) Akhir dari kasus ini adalah Tri suaka dan Zidan kemudian meminta maaf kepada Andika Kangen Band serta akan meminta izin setiap akan membawakan lagu orang lain. Selain itu, Tri Suaka dan Zidan membayar royalti kepada pemilik lagu.

Permasalahan lain yang sedang ramai adalah Ahmad Dhani dengan kuasa hukum Aldwin Rahardian, yang mengumumkan bahwa Once diharuskan dapat izin terlebih dahulu sebelum menyanyikan lagu karya Dewa 19 sesuai pada Pasal 9 jo jika ingin menyanyikan lagu Dewa 19. Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yaitu seseorang bisa terancam hukum tindak pidana yaitu satu tahun hukuman penjara dan atau maksimal denda sebesar Rp.100.000.000 apabila menggunakan karya orang lain yang bersifat komersil. Adapula pasal yang membahas kaitannya dengan hal tersebut yakni Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 dengan jelas memberi kesempatan bagi pengguna karya lagu maupun karya musik tanpa izin, mengenai penyerahan royalti pada pemegang hak cipta kepada LMK dengan syarat pengguna lagu tersebut tetap membayarkan royalti kepada LMKN. Pada intinya Dewa 19 sebenarnya tidak mengizinkan Once yang pernah menjadi bagian Dewa 19 untuk menyanyikan karya-karya Dewa 19 di berbagai acara diluar Dewa 19, namun Once menggunakan pasal lain yaitu kelonggaran izin dengan syarat sudah membayar royalti. Mengenai EO yang belum membayar royalti ke Dewa 19, Once mengaku tidak tahu.[[11]](#footnote-11) Ahmad Dhani mengaku sejak tahun 2010 tidak mengadakan konser sampai dengan 2022, namun Once tetap mengadakan konser solo dengan membawakan lagi minimal 3 lagu milik Ahmad Dhani. Once mengaku dari tahun 2010 hingga 2022 ia melalui event organizer telah membayar royalti ke LMKN. Namun ketika diminta bukti pembayaran royalti, Once tidak tahu dan tidak bisa menunjukkan bukti bayar royalti tersebut. Ahmad Dhani mengaku rugi miliaran rupiah karena lagu dibawakan Once tidak mendapatkan royalti. Namun karena kurangnya komunikasi antara Once dan Ahmad Dhani maka mulai tahun 2022 dan seterusnya Ahmad Dhani tidak memperbolehkan Once untuk membawakan lagu Dewa 19 dan Ahmad Dhani tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai royalti sebesar miliaran rupiah.

Berdasarkan penjabaran masalah, penulis terdorong untuk membuat penelitian dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Royalti Atas Cover Lagu Di salah satu platform media social yakni Youtube Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti”.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian royalti atas cover lagu di Youtube menurut PP No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik?
2. Bagaimana dampak hukum pada pencipta lagu terhadap penerapan PP No. 56 Tahun 2021 tentang pemberian royalti atas cover lagu pada platform media sosial Youtube?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji mekanisme pemberian royalti atas cover lagu di Youtube menurut PP No. 56 Tahun 2021.
2. Untuk mengkaji dampak hukum bagi pencipta lagu terhadap penerapan PP no. 56 Tahun 2021 pada pemberian royalti atas cover lagu platform media sosial Youtube.

## Urgensi Penelitian

1. Penelitian diharapkan mampu mempersembahkan sumbangan pikiran serta pengetahuan di dalam perkembangan ilmu hukum baik nasional maupun internasional, serta dapat memberikan saran dan modal ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis terutama terkait pembayaran royalti atas cover lagu di Youtube.
2. Penulisan diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan referensi, literatur atau bahan informasi serta mampu menjadi pedoman bagi penulisan penelitian hukum selanjutnya.
3. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi serta saran yang digunakan oleh akademik dan penelitian selanjutnya mengenai studi kasus pembayaran royalti atas cover lagu pada platform media sosial Youtube.

## Tinjauan Pustaka

1. Tanu Iswantono , Abraham Ferry Rosando, dalam Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Tahun 2022 pada judul “*Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*”. Indonesia memiliki dua Lembaga untuk mengelola royalti yaitu institusi nirlaba bawahan dari Kementerian Hukum dan HAM yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif. Institusi tersebut bertugas untuk mengelola hak cipta lagu dan musik. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 telah aktif dalam mengatur mekanisme pembayaran royalti, kewajiban memberi bagi hasil (*sharing profit*) royalti dimulai dari pendaftaran karya kepada Lembaga. Sebagai langkah yang saling terkait mengenai pengelolaan royalti maka dibentuklah Lembaga tersebut, dari mulai lagu gubahan seseorang selesai dibuat, didaftarkan kemudian dimanfaatkan hak ekonominya oleh orang lain sehingga menghasilkan royalti yang akan dikelola atau disimpan selama dua tahun sebagai masa simpan atau masa tunggu sebelum akhirnya kadaluarsa. Selama dua tahun dana tersebut disimpan hingga masa kadaluarsa telah habis apabila tidak diambil oleh pemegang hak cipta, fee royalti yang ditarik dari pihak pemanfaat karya cipta berubah menjadi dana kas Lembaga manajemen kolektif nasional. Lembaga Manajemen Kolektif, bertugas mengawasi penggunaan karya cipta oleh seseorang yang buka pemilik aslinya sebagai hak pelaku pertunjukan, hak penyiaran dan sebagainya. Evaluasi dilakukan oleh LMKN selama setahun sekali sedangkan pembiyaan organisasi diperoleh dari pengumpulan royalty sebanyak-banyaknya sebesar 20% per tahun maupun 30% per lima tahun. [[12]](#footnote-12)

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas hal yang sama yaitu proses kelola royalti atas hak cipta sutau musik dan lagu menurut undang-undang. Sedangkan perbedaan yaitu penelitian yang dibuat penulis khusus meninjau alur dalam mengelola royalti berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, serta dampak penerapan mengunggah cover lagu pada platform Youtube.

1. Febri Noor Hediati, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang yang berjudul "*Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Royalti Atas PP Nomor 56 Tahun 2021*". LMKN melakukan penarikan dana royalti didasarkan pada informasi yang ada di sentral data musik maupun lagu. Lisensi diperoleh dengan cara memasukkan data pada sistem informasi Lembaga LMKN. Semua masyarakat yang menggunakan karya secara komersil baik yang sudah mendapat lisensi atau belum serta sudah terdaftar atau belum wajib menyetorkan royalti kepada LMKN melalui perjanjian dan proses tertentu. PP No. 56 Tahun 2021 masyarakat berharap bahwa pemerintah seharusnya mengadakan sosialisasi terkait peraturan-peraturan hak cipta kepala musisi, pemegang hak cipta, masyarakat umum, pemilik café, penyanyi serta orang-orang yang menggunakan karya cipta lagu sebelum diberi tindakan tegas sesuai hukum. Peraturan Pemerintah dibuat untuk menngurangi permasalahan antara pemilik hak cipta dan pengguna. Pelaku usaha dan masyarakat umum harus mengeluarkan dana lebih untuk menikmati lagu atau music dan di sisi lain pemilik hak cipta ingin dihargai dengan adanya royalti.[[13]](#footnote-13)

Persamaan dengan penelitian milik penulis ialah meneliti tentang perlindungan hukum pada PP No. 56 Tahun 2021 yaitu mengenai royalti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih menegaskan pembahasan mengenai mekanisme atau alur dari pemberian royalti untuk cover di Youtube serta dampak penerapan PP No. 56 Tahun 2021 di Indonesia saat ini mengenai pengelolaan royalti untuk cover lagu di platform media sosial berupa Youtube.

1. Karel Martinus Siahaya, Dyah Permata Budi Asri, dalam jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum yang berjudul “*Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021*”. Pemerintah menunjuk dua lembaga nirlaba yakni Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai institusi resmi yang melakukan penarikan, penyimpanan, pengumpulan, pendistribusian royalti. Sebelum Pemegang Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Karya Cipta ataupun Pemegang Hak Terkait ingin melakuklan penarikan royalti maka dilakukan pendaftaran produk atau karya ciptaannya terlebih dahulu kepada Lembaga tersebut sehingga proses penarikan royalti bisa dilaksanakan dengan lancar dan sesuai regulasi yang berlaku. Penarikan Royalti berdasarkan penggunaan hak cipta secara komersil diserahkan pada Pemilik Hak Cipta, Pemegang Karya Cipta serta Pemegang Hak Terkait yang terdaftar pada LMK dilaksanakan oleh LMK sendiri. Sedangkan penarikan royalti bagi Pemilik Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait serta Pencipta yang belum terdaftar pada LMK diberi jangka waktu pengambilan yakni dua tahun sesudah adanya informasi dari Lembaga. Pengoptimalan fungsi pengelolaan royalti telah diamanatkan oleh Pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik untuk mendaftarkan karya cipta lagu maupun musik. Salah satu langkah pemerintah untuk memaksimalkan kinerja pengelolaan baik penarikan ataupun pemberian royalti adalah dengan adanya SILM.[[14]](#footnote-14)

Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai perlindungan hukum yang ada pada PP No. 56 Tahun 2021 yaitu melindungi hak cipta serta penarikan royalti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis memfokuskan penelitian pada mekanisme pengelolaan royalti untuk cover lagu di Youtube serta dampak penerapan PP No. 56 Tahun 2021.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset ini ialah termasuk dalam jenis riset kepustakaan (*library research*). Riset Kepustakaan yaitu suatu riset yang dikaji melalui digunakannya berbagai literatur atau sumber informasi (kepustakaan). Sumber informasi tersebut dapat berbentuk karya tulis, buku, catatan, jurnal ilmiah ataupun hasil laporan riset terdahulu.[[15]](#footnote-15) Jenis penelitian kepustakaan penulis gunakan dalam membuat riset ini karena riset ini didapat dari kajian informasi-informasi mengenai hukum tertulis yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penulis mendapatkan informasi dari jurnal penelitian terdahulu, buku, laporan penelitian terdahulu serta catatan sehingga dapat dipublikasikan secara publik dan menjadi penelitian normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada riset ini ialah pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif ialah jenis pendekatan yang focus utamanya ialah melihat berbagai masalah hukum melalui pandangan normatif yaitu bisa atau tidak bisa dilakukan berdasarkan aturan yang ada.[[16]](#footnote-16) Metode yang penulis lakukan dalam melaksanakan riset hukum ini, yaitu: *Statute Approch* (pendekatan Undang-Undang) sebagai sumber hukum primer dari riset yang menjadi kajian penulis.

1. Data Penelitian

Sumber Data riset Penelitian Normatif diperoleh dari:[[17]](#footnote-17)

1. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang sifatnya mengikat yakni bahan hukum primer pada riset ini ialah PP No. 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik.
2. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memaparkan keterangan mengenai berbagai hal dalam bahan hukum primer yakni literatur meliputi laporan karya ilmiah ilmu hukum, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, majalah serta pencarian di internet mengenai hukum.
3. Metode Pengumpulan Data

Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum merupakan riset yang dijalankan hanya tentang ilmu hukum untuk tujuan memberikan bantuian pada perkembangan ilmu hukum di dalam menjabarkan fakta hukum.[[18]](#footnote-18) Untuk menghasilkan data yang komplit, komprehensif, dan menyeluruh dalam penyusunan riset ini, oleh sebab itu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada riset ini yaitu studi pustaka (*study library*). Studi pustaka ialah pendalaman informasi tentang suatu bidang contohnya ilmu hukum yang diperoleh melalui banyak sumber serta dipublikasikan secara umum yang diperlukan pada riset hukum normatif. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui banyak referensi dari sumber literatur seperti buku-buku kajian ilmiah di perpustakaan masing-masing perguruan tinggi, *internet browsing*, serta website komputer.

1. Metode Analisis Data

Penggunaan metode analisis data kualitatif digunakan dalam riset ini karena prosedur analisis data pada riset ini menghasilkan data yang berupa data deskriptif yaitu berisi kata-kata baik tulis ataupun lisan dari partisipan serta pengamatan tindakan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui logika induktif, untuk mengambil simpulan dari situasi-situasi hingga menjadi kasus yang sifatnya umum.[[19]](#footnote-19) Hasil dari analisa selanjutnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk dirangkai menjadi sebuah kesimpulan dalam membandingkan regulasi legalitas.

## **Rencana Sistematika Penulisan**

Riset ini membagi struktur penulisan menjadi 4 (empat) bab yang saling berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**

Bab I berisi keterangan lebih luas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Urutan penulisan pada Bab I sebagai berikut :

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Urgensi Penelitian
5. Tinjauan Pustaka
6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

**BAB II Tinjauan Konseptual**

Bab II menyajikan penjelasan teori hukum serta norma hukum yang selaras dengan isu masalah pada riset ini dengan mempertimbangkan variabel riset dalam judul.

Urutan penulisan pada Bab II sebagai berikut:

1. Tinjauan tentang Hak Cipta
2. Tinjauan tentang Royalti
3. Tinjauan tentang Media Elektronik

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab III menjelaskan penemuan riset yang sudah dianalisa. Informasi yang diperoleh disajikan sesuai dengan susunan permasalahan, yang didasarkan pada pemahaman konseptual yang telah ditetapkan.

Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberian Royalti atas Cover Lagu di Youtube Menurut PP No. 56 Tahun 2021
2. Dampak Hukum Terhadap Penerapan PP No. 56 Tahun 2021 pada Pemberian Royalti atas Cover Lagu di Youtube.

**BAB IV Penutup**

Bab IV berupa simpulan dari hasil dari analisa penelitian hingga memberikan jawaban terhadap perumusan permasalahan.

Urutan penulisan pada Bab IV sebagai berikut:

1. Kesimpulan
2. Saran

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan tentang Hak Cipta

1. **Definisi Hak Cipta**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak distingtif yang Pemerintah berikan untuk setiap individu yang menciptakan karya cipta sebagai pencipta kekayaan intelektual. HKI dikatakan menjadi penghargaan dari sebuah karya cipta yang dihasilkan pemiliknya hingga si tuannya memilki wewenang atas penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut, penjualan dan kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan hasil kekayaan intelektual. Hak Cipta ialah bagian dari HKI, Hak Cipta menjadi bagian dari kekayaan intelektual sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, yakni Hak Cipta dipaparkan menjadi hak distingtif pencipta. Hak Cipta mencakup berbagai jenis karya intelektual dengan ruang objek memiliki batasan paling besar, karena terdapat pengetahuan, kreatifitas & catatan (*art & literary*) serta lagu maupun seni musik juga memiliki objek yang luas. Karya cipta lagu adalah karya intelektual manusia yang memberikan kontribusi besar pada manusia. Karya tersebut dihasilkan melalui dedikasi, pemikiran, tenaga dan pikiran.[[20]](#footnote-20)

21

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) sudah dijadikan fokus yang signifikan. Karya intelektual memberikan dampak besar untuk kehidupan masyarakat, seperti dalam perekonomian sehingga para pencipta pantas diberi penghargaan lewat hak intelektualnya. Kontribusi dari karya intelektual memiliki dampak yang besar pada perkembangan lingkungan masyarakat, termasuk dalam konteks perekonomian. Sehingga, pemilik hak cipta layak untuk dihargai melalui pengakuan atas hak-hak intelektual mereka. Penghargaan itulah yang membuat kreator terus mengembangkan hasil karyanya atau menghasilkan karya-karya baru yang dapat dinikmati orang banyak. Selain itu penghargaan tersebut dapat membantu berbagia bidang untuk mengalami peningkatan.[[21]](#footnote-21) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak perlindungan hukum bagi pemilik hasil kemampuan berpikir kreatif yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, yang berguna dalam menunjang kehidupan manusia karena mempunyai nilai ekonomi.[[22]](#footnote-22)

Beberapa elemen penting pada Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

a. Hak eksklusif yang dipersembahkan oleh hukum;

b. Hak eksklusif berhubungan atas ketrampilan manusia berdasar pada ketrampilan intelektual; dan

c. Ketrampilan intelektual mempunyai nilai ekonomi.

Sebuah karya yang berasal dari hasil cipta intelektual dilindungi undang-undang dan disahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Negara Indonesia seharusnya menegaskan mengenai adanya Hak Kekayaan Intelektual menjadi penghargaan dan perlindungan pada hasil karya yang diciptakan masyarakat Indonesia. Sehingga karya tersebut dapat menunjang para pencipta karya untuk terus menciptakan karya luar biasa dan memperoleh keuntungannya sebagaimana dari hasil pemikirannya serta melindungi karya dari pencurian maupun pemanfaatan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih untung pribadi tanpa memperdulikan penemu suatu karya tersebut.[[23]](#footnote-23)

Era modern terdapat beberapa trik yang dilakukan oleh pencipta karya untuk meminimalisasi pembajakan dan pencurian karya cipta. Dokumentasi yang baik serta mendukung pencegahan pembajakan dapat dilakukan oleh pencipta karya sebagai langkah pencegahan pencurian atau pembajakan. Hak Kekayaan Intelektual mengelola suatu objek yang merupakan hasil dari proses pemikiran individu. Jika seseorang diizinkan untuk menggunakan suatu karya dengan bebas, oleh sebab itu hasil karya tersebut bermanfaat untuk dinikmati oleh orang lain tanpa memberikan imbalan yang sesuai kepada pemiliknya. Oleh karena hal tersebut pemilik karya tersebut tidak mendapatkan hal yang seimbang.

**2.** **Pengaturan Hak Cipta**

Regulasi tentang perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 UUHC. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan ciptaan secara komersial. Secara komersial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar atas pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait. Penggunaan lagu untuk tujuan komersial banyak dilakukan di Indonesia.[[24]](#footnote-24)

Hak Cipta yang merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang tidak berwujud, benda yang tidak berwujud. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, “Yang disebut benda adalah setiap barang, dan setiap hak yang dapat dikuasai menjadi suatu benda kekayaan (harta) atau hak milik. Bagi masyarakat Indonesia yang terbiasa memperdagangkan benda-benda konkrit, misalnya Misalnya tanah, rumah, emas termasuk hewan ternak, benda abstrak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15). Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Hak Kekayaan Intelektual).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang HKI adalah: Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tumbuhan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Perdagangan Rahasia, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Secara konvensional HKI dibedakan menjadi 2, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang meliputi: Paten, desain industri, merek dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.[[25]](#footnote-25)

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ). Hak Cipta memiliki diatur dengan jelas dalam perundang-undangan. Hak Cipta memiliki sifat benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga diartikan sebagai bagian dari hak milik yang abstrak namun pemilik hak cipta tersebut dapat menggunakannnya seperti menjual, menggadai, dan lain sebagainya. Hak cipta tersebut dapat memberikan keuntungan untuk si pemilik sebagai pernghargaan dari buah pemikiran dalam menciptakan karya.

1. **Ruang Limgkup Hak Hak Cipta**

*Intellectual property, intangible right, creative property, dan incorporeal property* lebih dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan tentang sekumpulan cara pikir logika dari kemampuan berpikir manusia yang muncul dengan nyata oleh karena itu diperlukan adanya usaha.[[26]](#footnote-26)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ruang Lingkup Hak Cipta menurut Undang-Undang Pasal 40 Ayat 1 UUHC yakni :[[27]](#footnote-27)

* 1. Undang-Undang hak cipta melindungi karya cipta yang berkaitan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian. Kesusastraan yang mencakup :

1. Buku, pamphlet, layout dari sebuah karya tulis yang telah diterbitkan dan seluruh hasil karya tulis yang sejenis,
2. Lektur, Kuliah, Pidato dan karya cipta lain yang memiliki persamaan jenis dengan karya tersebut,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kebutuhan Pendidikan dan ilmu pengetahuan,
4. Lagu dan atau music yang diciptakan Bersama dengan teks ataupun tidak,
5. Karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase,
6. Karya seni terapan,
7. Karya arsiterktur,
8. Peta,
9. Karya seni batik atau seni motif lain,
10. Karya fotografi,
11. Potret,
12. Karya Sinematografi
13. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
14. Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
15. Kompilasiciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya seni itu asli,
17. Permainan video
18. Program computer
    1. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dan tidak mempengaruhi hak cipta dari ciptaan aslinya.
    2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 meliputi perlindungan ciptaan yang belum diumumkan atau yang belum diumumkan tetapi telah direalisasikan dalam bentuk tertentu yang memungkinkan untuk memperbanyak ciptaan tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual meliputi beberapa hak kepemilikan ada pada bidang seni, teknologi atau ilmu pengetahuan yang lain. Kepemilikan HKI tidak diberlakukan di barangnya, namun pada hasil *skill* intelektual dari diri itu sendiri, yakni berupa ide dan kreatifitas. Menurut penjelasan diatas disimpulkan bahwa bentuk realitas dari kreasi intelektual pada komponen seni sastra, teknologi dan ilmu pengetahuan. Hak atas kepemilikan berasal dari cipta, karya, karsa seorang manusia bisa disebut juga kemampuan intelektualitas seorang manusia yang lahir hingga memiliki hak secara otomatis, oleh karena itu wajib diakui bahwasannya siapa saja yang menciptakan suatu karya dapat mengendalikannya yang bertujuan memberinya keuntungan. Karya intelektual dapat bermanifestasi dalam berbagai bidang. Sebagai hak kepemilikan yang timbul dari karya, ide, dan kemampuan intelektual manusia, pemilikya memiliki kebebasan untuk mengendalikan dan memanfaatkannya sesuai keinginannya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi komponen atas hukum kekayaan ataupun yang disebut hukum benda, sehingga pemilik HKI bebas dalam berbuat apapun yang dikehendakinya. Perkembangan berikutnya kebebasan tersebut mengalami perubahan. Adanya Batasan-batasan yang ditentukan seperti pemberlakuan lisensi wajib, pengambil alihan oleh pemerintah serta ketetnuan moral hingga hukum yang berlaku atas karya cipta yang dilarang karena tidak sejalan dengan norma susila dan ketertiban umum. Prinsip ini tetap mendasari pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, dengan mengamati sifat asli dan nilai dari hak tersebut. Sifat asli pada Hak Kekayaan Intelektual masih jadi tumpuan adanya perubahan pengaturan, seperti:

1. Memiliki pembatasan jangka waktu

Dilengkapi dengan batasan waktu tertentu, hasil cipta akan berpindah jadi pemilikan umum. Tapi, ada juga masa perlindungannya dapat diperpanjang terus jika sudah habis contohnya, Hak Merek. Penentuan dilakukan dengan jelas dan pasti pada aturan perundangan yang berkaitan dengan durasi waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

1. Eksklusif dan mutlak

HKI bisa dipertahankan pada siapa saja. Pemilik HKI dapat menuntut pelanggar hak tersebut. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak monopoli. Orang tersebut bisa menggunakan haknya untuk melarang siapa saja yang tidak disetujui untuk menggunakan ciptaannya. Dalam hal ini memungkinkan pemilikya untuk menutut siapa pun yang melanggar hak tersebut. Sebagai pemilik, seseorang memiliki monopoli atas haknya, yang memungkinkan untuk mengontrol penggunaan ciptaannya atau penemuan tanpa persetujuan.

1. Bersifat hak wajib mutlak yang bukan kebendaan

Pasal 50 Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwasannya hak milik ialah hak menggunakan manfaat benda sepuasnya serta tidak ada kekangan pada suatu benda atau memiliki hak penuh atas benda asalkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Pemerintah serta hak milik orang lain tidak terganggu.[[28]](#footnote-28) Hak kekayaan intelektual ialah hak berbentuk nonfisik, tidak termasuk dalam kategori benda.

1. **Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Asas hukum luas tidak terpatok pada aturan hukum semata, tapi hukum mustahil dimengerti apabila asas hukum yang ada secara menyeluruh tidak diketahui. Sistem Hak Kekayaan Intelektual memiliki asas-asas yang memiliki tujuan untuk menjaga keselarasan baik kepentingan umum dan individut, yakni:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Suatu hal yang wajar dan berhak atas upah seperti rasa aman karena perlindungan dan pengakuan atas karya bagi seorang pencipta sebuah karya. Perlindungan hukum bagi pencipta yaitu wewenang untuk melakukan apapun atas dasar kepentingan yang tidak mempunyai batasan baik di dalam negeri maupun luar negeri..

1. Prinsip Ekonomi (*The Economic Arguement*)

Hak kekayaan intelektual ialah hak yang asalnya dari aktivitas, kreativitas, keterampilan berpikir masing-masing manusia ditunjukkan pada masyarakat publik melalui bermacam-macam bentuk.

1. Prinsip Kebudayaan

Untuk prinsip kebudayaan sendiri merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, bangsa dan juga Negara.

1. Prinsip Sosial

Prinsip prinsip HAKI yang terakhir adalah prinsip sosial. Pada prinsip sosial merupakan prinsip yang mengatur terkait kepentingan manusia sebagai Warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.[[29]](#footnote-29)

Apapun pengakuan hukum mengenai hak serta disembahkan untuk perorangan maka karya tersebut tidak untuk dimanfaatkan oleh dirinya senidri melainkan harus memberikan kebermanfaatan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pemenuhan kepentingan seluruh masyarakat maka pemberian hak tersebut dilakukan. Hak Kekayaan Intelektual pada masing-masing negara memiliki tekanan yang berbeda. Perbedaan sistem hukum, sistem politik, dan landasan filosofis, menyebabkan perbedaan pandangan terhadap prinsip itu. Selain itu prinsip dapat dipengaruhi oleh sejarah kemerdekaan suatu negara. Perbedaan ini juga tercermin dalam pandangan mereka terhadap asas Hak Kekayaan Intelektual. Cara pandang persoalan asas Hak Kekayaan Intelektual itu berbeda antara negara maju dengan negara berkembang.

1. **Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Jangka waktu perlindungan hak cipta paling lama adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 (lima puluh tahun) sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan seperti fotografi. Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli bukan turunan (derivatif).

b. Selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya deridatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran.

c. Selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan.

d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.

e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

## Tinjauan tentang Royalti

1. **Definisi Royalti**

Royalti adalah suatu penghasilan yang didapatkan atas dasar kekayaan intelektual atau hak cipta dari karya yang dibuatnya. Royalti dibayarkan oleh pihak-pihak yang menggunakan karya cipta tersebut baik untuk didengarkan, di cover ulang, disebar luaskan, dinyanyikan ulang atau lainnya untuk tujuan tertentu. User diharuskan melakukan pembayaran *fee* royalti kepada pemilik hak cipta serta lagu apabila menunjukkan karya orang lain didepan umum.[[30]](#footnote-30)

Dalam perjanjian yang sudah dilakukan pastilah timbul hak dan kewajiban para pihak berupa royalti yang sudah di perjanjikan dan disepakati lalu di berikan kepada pemegang hak cipta dan para pihak yang mendapatkan lisensi tersebut. Pengertian royalti menurut Pasal 1 angka 21 adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak terkait, dalam Pasal 80 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUHC No. 28 Tahun 2014, pemberian Royalti dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan berlakunya jangka waktu lisensi dan besaran royalti sesuai deengan yang sudah disepakati dalam perjanjian para pihak yang terkait.[[31]](#footnote-31)

Untuk memahami konsep royalti secara mendalam, penting untuk merujuk kepada definisinya secara hariah. Definisi royalty menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbagi menjadi tiga penjelasan yakni:

1. Pembayaran biaya jasa yang disetorkan kepada pencipta oleh penerbit pada masing-masing buku yang diterbitkan.
2. Pembayaran bagian dari hasil produksi atau pendapatan pada orang berhak karena sudah memberikan izin pengelolaan eksplorasi minyak dan lainnya.
3. Pembayaran biaya jasa dari pengguna karena orang atau perusahaan dari pemilik paten dari suatu barang memberikan izin produksi.[[32]](#footnote-32)

Royalti juga dibahas pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67 Tahun 2016 mengenai Deklarasi Inisiatif atas Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, Peraturan ini menjelaskan bahwasannya royalti merupakan sejumlah uang yang wajib disetorkan langsung ataupun tidak langsung oleh si pembeli untuk syarat pada transaksi pembelian benda *import* yang berisi sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaannya dengan yang dibahas pada Undang-Undang mengenai Hak Cipta Lagu / Musik adalah fungsi uangnya yakni jika dalam PMK, uang royalti dianggap sebagai uang transaksi pembelian barang impor sedangkan hak cipta lagu / music uang tersebut sebagai tanda bahwa pengguna membayar hak ekonomi atau dianggap sebagai uang izin penggunaan sebuah karya lagu atau musik.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, membahas tentang royalti yakni royalti ialah Uang jasa yang seharusnya didapat oleh pemilik maupun pencipta hak terkait atas syarat digunakannya manfaat ekonomi pada hak terkait sebuah produk ciptaan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 mengenai Paten, royalti diartikan sebuah biaya jasa yang diserahkan atas digunakannya hak paten. Intinya ialah royalti itu sejumlah uang atas jasa atas digunakannya hak ekonomi dari suatu benda atau karya cipta tergantung pada peraturan mana yang menjelaskannya. Uang jasa tersebut dibayarkan kepada pemilik hak atas karya cipta itu sendiri oleh si pengguna haka atau ciptaan tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 memaparkan permasalahan pembayaran royalti. Aturan Royalti musik atau lagu analog hingga digital diatur dalam PP tersebut serta pengelolaan Hak ekonomi pemegang hak cipta maupun pencipta, contohnya ciptaan yang ditunjukan, ciptaan yang diumumkan dan cipta karya yang dikomunikasikan, Hak ekonomi pengguna pementasan, seperti penyiaran maupun informasi pementasan. Sedangkan hak ekonomi pengelola atau produser fonogram, terdiri dari ketersediaan fonogram baik melalui kabel maupun non kabel yang bisa dilihat oleh umum.

Penganugerahan surat izin, penghimpunan serta pendistribusian royalti adalah awal syarat dikelolanya royalti lagu dan musik oleh lembaga. LMK pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 diartikan sebagai suatu organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai wakil dari para pemilik dan pencipta hak terkait melakukan pengelolaan royalti. Lembaga tersebut berbadan hokum nirlaba yang dianugerahi hak melakukan pengelolaan atas manfaat ekonomi suatu barang ciptaan seorang pencipta ataupun pemilik hak cipta karya lagu dan musik yaitu dilakukannya pengumpulan serta pendistribusian royalti.[[33]](#footnote-33)

Pengelolaan royalti terkait serta hak cipta lagu dan musik dilaksanakan dengan merata untuk semua pihak yang menggunakan hak ekonomi atas lagu dan musik agar *user* tidak memiliki perasaan rugi berkali-kali. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengumumkan penarikan royalti dan hak pengelolaan dilakukan oleh suatu Lembaga yaitu Lembaga LMKn dan LMK. LMKn itu sebagai wakil keperluan serta pihak yang menjadi wakil pemegang hak terkait. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak menegaskan penggunaan huruf n dengan huruf kecil atau besar pada kata LMKn serta tidak memperjelas hubungan diantara keduanya yakni LMK dengan LMKn oleh karena itu hukum mengenai hubungan keduanya menjadi tidak jelas. Meskipun permasalahan tersebut belum jelas ketentuannya namun di Indonesia, LMKN diakui sebagai Lembaga resmi, Lembaga yang memiliki wewenang seluruhnya atas penanganan administrasi hak cipta lagu atau music.

LMKN dibentuk sebagai langkah untuk mengatasi keluhan mengenai banyaknya pemungutan yang dilakukan oleh LMK secara bergantian sehingga membuat para pengguna hak cipta tidak nyaman.[[34]](#footnote-34) Tujuan dibentuknya LMKN ini adalah untuk menyederhanakan proses yang sebelumnya dianggap kurang yaman karena banyaknya LMK yang melakukan pemungutan secara individual.

1. **Regulasi yang Membahas Pembayaran Royalti**

Secara umum, terdapat beberapa regulasi hukun perundangan yang membahas tentang royalti. Berikut adalah beberapa regulasi yang menangani tentang royalti hingga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu :

1. Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menjelaskan bahwa: “Royalti adalah **imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”**
2. Pasal 44 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta atau penciptanya atas program atau acara tertentu yang disiarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 12 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021 juga menyebutkan, LMKN akan melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan lagu dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK (Lembaga Manajemen Kolektif).
4. Pasal 4 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), royalti merupakan suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun yang dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan terhadap beberapa hal, seperti:
5. Bidang kesenian, karya ilmiah, paten, desain, model rencana, kesusastraan, merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya.
6. Pemberian dan penggunaan pengetahuan atas informasi di bidang ilmiah, komersial, atau teknikal industrial.
7. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan hak menggunakan (penggunaan) menerima rekaman.
8. Gambar/rekaman suara yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa.
9. Penggunaan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi serta penggunaan film gambar hidup atau pita video untuk siaran televisi dan pita suara untuk siaran radio.

Terdapat beberapa peraturan mengenai royalti lainnya. Pada intinya adalah royalti merupakan imbalan yang diberika kepada si pemilik karya karena karya yang mereka buat memberikan keuntungan kepada kita. Royalti diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap setiap pencipta karya agar terus lahir ide-ide baru yang dapat digunakan di masa depan. Penggunaan royalti dapt dijelaskan pada kasus misalkan seorang penikmat seni, jika ingin mendengar sebuah lagu maka akan emmbeli kaset dari lagu tersebut. Apabila hanya ingin mendengarkan sebuah lagu, masyarakat tida perlu membayar royalty. Lain halnya apabila seorang pengusaha yang ingin memperdengarkan sebuah lagu pada café yang ia miliki. Pengusaha tersebut wajib membayar royalti. [[35]](#footnote-35)

1. **Perjanjian yang Mendasari Penerapan Royalti**

Perjanjian royalti memegang peranan yang signifikan dalam karier individu seperti penulis, composer, musisi, seniman, ilmuan, dan profesi lain yang menghasilkan karya dengan kreatifitas intelektual. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat menyetujui sebuah perjanjian royalty. Besaran royalti adalah nominal yang dari suatu cipta karya, besaran royalti bervariasi tergantung nilai dari pemilik karya.

1. Masa berlaku perjanjian.

Pembuatan perjanjian mencantumkan rentang waktu kerjasama. Waktu berlakunya suatu kerjasama disahkan menurut kesepakatan pemilik karya dengan penguna karya. Apabila masa berlaku sudah habis maka pengguna karya tersebut harus meminta izin kembali atau memperpanjang masa perjanjian.

1. Alur penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah tentunya harus melewati mekanisme yang sesuai dan disepakati agar tidak merugikan pihak manapun di kemudian hari. Mengenai nominal royalti setiap label music memiliki regulasi atau aturannya sendiri. Kebijakan besaran royalti bervariasi. Namun yang penitng adalah sebelum menyetujui kesepakatan besaran royalti semua pihak penting untuk memahami keseluruhan isi dari suatu perjanjian kerjasama.

Umumnya yang dicantumkan dalam sebuah perjanjian kerjasama terkait pembayaran royaltI ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual.
2. Rentang waktu atau durasi lisensi.
3. Nominal besaran royalti hingga sistem pembayarannya seperti berdasarkan omset tahunan atau jumlah pemasukkan netto.
4. Pemilik hak cipta menganggung beban pajak.
5. Seluruh pihak yang terlibat perjanjian bertanggung jawab secara hukum.
6. **Keterkaitan Royalti dengan Hak Cipta**

Hak cipta ialah wewenang khusus atau hak pribadi milik seorang pembuat sebuah karya, hak tersebut timbul otomatis berdasar pada prinsip deklarasi yaitu muncul ketika suatu karya cipta selesai dimanifestasikan ke dalam rupa yang absolut dan konkret serta tidak memangkas batasan-batasan yang telah diatur oleh regulasi perundangan. Pemilik hak cipta dapat berupa individu atau entitas perusahaan (organisasi). Apabila orang lain menggunakan karya tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk mendapat manfaat dari karya tersebut maka, orang tersebut wajib meminta izin dan memberikan royalti pada penciptanya maupun pemilik karya tersebut.[[36]](#footnote-36)

Hak cipta yang telah memiliki lisensi resmi dan sudah terdahfat di LMKN, maka karya cipta tersebut sudah dapat dikenakan royalti apabila dimanfaatkan oleh orang lain. Pemilik hak cipta dapat menuntut royalti apabila tidak ada perjanjian penggunaan karya. **Pasal 3 Ayat 1 PP 56** Tahun 2021 menyimpulkan masing-masing individu bisa menggunakan suatu karya cipta lagu secara komersial pada tempat umum yang sifatnya komersial dengan memberikan uang jasa atau yang disebut dengan royalti melalui LMKN untuk pemegang, pemilik hak cipta hingga pembuat sebuah karya cipta. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun berhak untuk memanfaatkan secara komersil suatu lagu atau musik serta ditampilkan pada publik dengan syarat membayar royalti untuk pemilik hak cipta lagu atau musik melalui LMKN sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan kerjasama dan aturan yang berlaku.

1. **Royalti Hak Cipta pada Media Elektronik**

Penggunaan hak cipta melalui media elektronik menjadi salah satu target pembayaran royalti. Pembayaran tersebut ditinjau atas hak cipta yang digunakan melalui media elektronik juga menjadi perhatian serius. Semakin adanya peningkatan ilmu teknologi maka sudah pasti diimbangi dampaknya yaitu makin mudahnya penyebaran suatu karya yang memiliki hak eksklusif yaitu hak cipta. Namun sayangnya, masyarakat seakan kurang edukasi mengenai pembayaran royalti, perjanjian royalti, izin penggunaan karya dll sehingga masyarakat melalaikannya.

Salah satu contoh kegiatan yang dapat dikenakan royalti adalah pemutaran musik di suatu kafe, tempat makan, tempat umum melalui media elektronik seperti TV, Youtube, CD, Spotify, Hp, Aplikasi-aplikasi dll. Kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau royalti hak cipta karena tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta lagu. Oleh sebab itu, biasanya mereka yang sudah paham mengenai pengurusan royalti akan lebih dulu meminta izin terhadap pemegang hak cipta mengenai lagu apa yang akan digunakan pada sebuah pertunjukan di media elektronik. Setelah itu membuat perjanjian royalti sesuai kesepakatan. Setelah acara berlangsung, maka manajemen akan menyetorkan uang pembayaran royalti ke LMKN.

Beberapa jenis royalti pada media elektronik yaitu royalti rekaman, royalti penerbitan, dan lain sebagainya. Sejumlah uang jasa atau keuntungan yang diberikan kepada master atau *owner* rekaman yang biasa disetorkan pada label rekaman disebut dengan royalti rekaman. Sedangkan uang jasa yang diberikan pada penulis lagu maupun komposer disebut dengan royalti penerbitan. Youtube membayar royalti atas setiap lagu yang diputar atau digunakan oleh konten creator maupun penikmat youtube music. Skema pembayaran Youtube dikatakan rumit. Youtube membayar royalti streaming paling rendah dalam satu akun yaitu USD 0,00069 per putaran. Sedangkan composer atau musisi bisa meraup sebesar USD 0,002 per putaran music jika menggunakan akun Youtube.[[37]](#footnote-37)

1. **Penentuan Royalti Elektronik**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, entitas atau individu yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti adalah pihak yang dengan sadar memanfaatkan karya musik atau lagu yang sifatnya komersial untuk ditampilkan di depan umum sehingga mendapat keuntungan, ialah Penyelenggara seminar dan konferensi komersial, Pemilik atau pengelola restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, Penyelenggara konser musik; Perusahaan transportasi seperti pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; Pengelola pameran dan bazar; Pemilik atau pengelola bioskop; Layanan nada tunggu telepon; Institusi keuangan dan kantor; Pertokoan; Pusat rekreasi; Lembaga penyiaran televisi; Lembaga penyiaran radio; Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan Usaha karaoke.

Tarif pemberian royalti belum dipastikan secara secara jelas namun saat ini masih menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Para pengelola tempat serta jenis kegiatan diwajibkan melakukan pembayaran sebagai uang jasa atau royalti untuk para pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, pencipta dan lain-lain melalui Lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu LMKN. Dibawah ini merupakan besaran royalti untuk para pengelola tempat serta jenis kegiatan:

1. Besaran royalti untuk kegiatan seminar dan konferensi komersial yaitu Rp. 500.000 per hari bagi pemilik hak cipta ataupun hak terkait.

2. Besaran royalti untuk kafe dan restoran adalah Rp 60.000 dari jumlah kursi per tahun bagi pemilik hak cipta ataupun hak terkait.

3. Nominal royalti pub, bar dan bistro Rp. 180.000/meter per tahun untuk pemilik hak cipta ataupun hak terkait.

4. Uang royalti yang diperuntukkan untuk klab malam dan diskotik berdasarkan tiap meter persegi per tahun yaitu Rp. 250.000 untuk pencipta dan Rp. 180.000 per meter persegi per tahun untuk royalti hak terkait.

5. Konser musik kena tarif royalti sebesar 2 persen bruto tiket terjual + 1 persen tiket gratis.

6. Sedangkan konser musik gratis terkena royalti sebesar 2 persen dari dana produksi musik.

7. Transportasi umum seperti Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut memiliki besaran royalti dengan cara mengkalikan banyak penumpang dengan 0,25 persen dari harga tiket paling kecil kemudian dikalikan durasi musik dikalikan presentase tingkat penggunaan musik.

8. Pameran dan bazar dikenakan tarif royalti Rp 1.500.000 per hari.

9. Besaran uang royalti untuk Bioskop ialah Rp 3.600.000 per layar per tahun.

10. Tarif royalti untuk Nada tunggu telepon Rp. 100.000 per sambung telepon tiap tahun.

11. Royalti untuk perbankan dan perkantoran yaitu Rp. 6.000 per meter persegi tiap tahun.

12. Pemilik supermarket, pasar swalayan, mal, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga dan ruang pameran memiliki perhitungan seperti:

a. Ruangan seluas 500 meter persegi pertama dikenakan biaya Rp 4.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 4.000/meter (untuk royalti hak terkait)

b. Ruangan 500 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.500/meter (untuk royalti hak terkait)

c. Ruangan 1.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.000/meter (untuk royalti hak terkait)

d. Ruangan 3.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.500/meter (untuk royalti hak terkait)

e. Ruangan 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.000/meter (untuk royalti hak terkait)

f. Ruangan 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 1.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 1.500/meter (untuk royalti hak terkait).

13. Pusat rekreasi dikenakan tarif royalty sebesar 1,3 persen dari harga tiket dikalikan jumlah pengunjung dalam 300 hari dikalikan persentase penggunaan musik.

14. Pusat rekreasi dalam ruangan gratis yaitu Rp 6.000.000/ tahun.

15. Untuk pemilik Hotel dan fasilitas hotel besaran royaltinya adalah

a. Jumlah kamar 1-50 dikenakan tarif royalti Rp 2.000.000/tahun

b. Jumlah kamar 51-100 dikenakan tarif royalti Rp 4.000.000/tahun

c. Jumlah kamar 101-150 dikenakan tarif royalti Rp 6.000.000/tahun

d. Jumlah kamar 151-200 dikenakan tarif royalti Rp 8.000.000/tahun

e. Jumlah kamar lebih dari 201 dikenakan tarif royalti Rp.12.000.000/tahun

16. Resort, hotel eksklusif dan hotel butik dikenakan tarif royalti lumpsum per tahun sebesar Rp. 1.600.000.

17. Untuk Bisnis Karaoke hitungan besarannya sebagai berikut:

1. Karaoke tanpa kamar (Aula) Rp. 20.000/ruang/ hari
2. Karaoke keluarga Rp. 12.000/ ruang/ hari
3. Karaoke Eksklusif Rp. 50. 000/ruang/ hari

\*Dengan perhitungan 50% untuk hak cipta dan 50% untuk hak terkait.

1. Karaoke kubus (Booth) perhitungannya untuk hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp. 300.000/kubus/ tahun.

18. Perhitungan Lembaga penyiaran radio yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya.

19. Untuk Radio non komersial dan RRI dikenakan tarif royalti sebesar Rp 2 juta per tahun.

20. Perhitungan Lembaga penyiaran televisi yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya.

\*Dengan catatan, pembayaran untuk lembaga penyiaran televisi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

a. Televisi musik dikenakan tarif royalti 100%.

b. Televisi informasi dan hiburan dikenakan tarif royalti 50%.

c. Televisi berita dan olahraga dikenakan tarif royalti 20%.

21. Televisi lokal non komersial dikenakan biaya royalti sebesar Rp. 10.000.000/tahun. Perhitungan pembagian sebesar Rp 6.000.000 untuk hak cipta dan Rp 4. 000.000 untuk hak terkait.

**7. Penentuan Royalti di Youtube**

Royalti youtube didasarkan pada beberapa hal mengenai penggunaan video dan penggunaan musik yang memiliki lisensi resmi kemudian dimanfaatkan ulang oleh konten kreator untuk memperoleh keuntungan pribadi. PP No. 56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik tidak menerangkan secara detail tentang pemanfaatan ekonomi atas lagu. Contoh penggunaan manfaat ekonomi sebuah karya cipta atau hak cipta lagu pada media elektronik maupun media sosial yaitu cover lagu pada channel Yotube. Pasal 3 Ayat 2, hanya memaparkan secara umum mengenai pembayaran royalti atas media elektronik namun tidak diterangkan secara pasti bahwa platform Youtube merupakan platform yang wajib melakukan pembayaran royalty pada pemegang hak cipta lagu atau musik dikarenakan sifatnya komersial sehingga Youtube dikenakan biaya royalti sekian harga untuk disetorkan kepada pemilik hak cipta melalui Lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu LMKN.[[38]](#footnote-38)

Menentukan perhitungan biaya royalti pada Youtube musik lebih rumit dan merupakan proses yang kompleks. Nominal royalti yang didapat oleh musisi berbeda-beda tergantung atas alur langganan serta jumlah pelanggan yang menggunakan paket berlangganan. Dilaporkan bahwa biaya royalti streaming pada Youtube musik serendah-rendahnya sekitar USD0,00069/putaran music/satu akun. Musisi dapat meraup untung USD 0,002/putaran musik jika mengaplikasikan pada Youtube Musik. Biaya tarif tersebut, musisi bisa memperoleh USD1 jika ada 500 pemutaran musik. Apabila pemutaran mencapai 1.000.000 putaran musik, maka penghasilan royalti yang diperoleh seorang musisi melalui platform Youtube adalah sekitar USD2,000 sama dengan Rp29.910.000. [[39]](#footnote-39)

Penentuan royalti di Youtube antara lain : Streaming music, Video yang dicover, Musik yang digunakan sebagai backsound, Video yang diupload ulang, Musik yang diupload ulang, Cover lagu, dan Cover video. Meskipun tidak dijelaskan dengan gamblang penentuan royalti di Undang-undnag namun, Youtube menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang dikenakan royalti. Apabila Youtube menerima laporan mengenai pelanggaran hak cipta dan yang bersangkutan tidak ada itikad baik maka Youtube berhak untuk men-*take down* video tersebut. Youtube tentunya memiliki syarat dan ketentuan konten yang akan ditampilkan dalam platform tersebut.

## Tinjauan tentang Media Elektronik

* 1. **Definisi Media Elektronik**

Media elektronik merupakan suatu bentuk alat penyampaian informasi maupun data. Data tersebut telah diolah kemudian disebarkan ataupun dapat diakses melalui bentuk elektronik, energi elektromekanikal dan alat komunikasi elektronik lainnya. Media elektronik yang dimaksud ialah berupa hp, telepon, televisi, radio, tab, komputer dan lainnya guna mengirim dan menerima informasi dengan media elektronik.[[40]](#footnote-40) Definisi ini selaras dengan penjelasan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menyebutkan bahwa sarana penyampaian informasi melalui media elektronik modern conoth radio, tv, hp, computer dan televisi.[[41]](#footnote-41)

Media elektronik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, sehingga penyampaian informasi melalui media elektronik juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan media elektronik di Indonesia seperti dari radio, televisi tabung kemudian telepon genggam hingga sampai saat ini yaitu smart tv, smart phone, dan elektronik lainnya. Tidak hanya media elektronik yang berkembang, aplikasi pendukung media tersebut juga berkembang dari segi fasilitas yang ditawarkan. Media elektronik yang semakin maju membuat Indonesia mudah menerima informasi apapun, baik jarak dekat maupun jarak jauh.

Manfaat perkembangan media elektronik di Indonesia adalah mempercepat akses informasi yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Kemajuan media elektronik tentunya mendukung perkembangan pendidikan masyarakat Indonesia. Para pelajar di sebagian sekolah atau perguruan tinggi saat ini memanfaatkan kemajuan media elektronik seperti penggunaan tab, laptop atau smart phone untuk kegiatan belajar mengajarnya. Pembelajaran ini tentunya mempermudah seseorang dalam mencari ilmu. Selain itu media elektronik yang berkembang pesat memberikan dampak yang positif bagi penggiat seni.

Seniman atau musisi dapat dengan mudah mempromosikan karyanya melalui media elektronik. Para penggiat seni juga dapat mencari keuntungan atas perkembangan media elektronik ini. Misalnya, seorang penyanyi dapat bernyanyi di media elektronik, diedit, kemudian di promosikan melalui media elektronik. Namun perkembangan media elektronik tersebut tidak semua lapisan masyarakat dapat mengikutinya karena terkendala berbagai hal misalnya biaya untuk emmbeli alat elektronik tersebut, terkendala penggunaan yang masih sulit dimengerti dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak semua lapisan masyarakat sudah menikmati perkembangan media elektronik yang dimaksud.

Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan media elektronik adalah banyaknya informasi-informasi yang hoaks dan konten-konten yang melanggar kesusilaan serta pencurian data. Saat ini berita hoak membuat masyarakat tidak bisa membedakan mana berit ayang benar dna mana yang berita bohong.[[42]](#footnote-42) Orang awam akan tertarik menggunakan media elektronik seperti hp, laptop dan tab untuk alat komunikasi mereka. Namun bahaya yang mengintai diluar dari segi kesehatan mata dan mental adalah adanya informasi hoaks yang dapat memicu retaknya persatuan dan kesatuan negara karena penyampaian berita palsu oleh individu yang tidak diketahui tujuannya. Konten atau iklan pada media elektronik yang mengganggu atau melanggar kesusilaan tentunya membuat resah pengguna karena media elektronik dimanfaatkan oleh semua umur baik anak-anak maupun dewasa saat ini menggunakan media elektronik. Pencurian data yang saat ini marak terjadi akibat dari kemajuan teknologi yang memberikan akses kepada pencuri melalui jaringan data dan media elektronik. Data tersebut nantinya akan disalah gunakan oleh pencuri data.

* 1. **Definisi Media Sosial**

Media sosial merupakan wadah sosial melalui media elektronik yang dilakukan secara online untuk berkomunikasi atau berinteraksi maupun mencari informasi seperti blog, facebook, Instagram, dan lainnya. Saat ini perkembangan media sosial berkembang sangat pesat hampir semua masyarakat di dunia menggunakan media tersebut. Semua lapisan umur menggunakan media social yang berbeda-beda. Media sosial yang biasa dimanfaatkan oleh seluruh individu dunia adalah blog jejaring sosial, wiki, yahoo serta google. Media sosial ialah media online untuk orang dapat saling berinteraksi menggunakan web yang diubah menjadi media komunikasi interaktif. Media sosial ini tentunya tidak terbatas pada tempat dan waktu, semua orang dapat menggunakan media sosial asalkan terhubung dengan jaringan internet.[[43]](#footnote-43)

Media sosial memiliki beberapa jenis seperti media sosial untuk mengunggah foto seperti facebook, Instagram, twitter dan tiktok. Sedangkan media sosial untuk mengunggah pendapat berupa tulisan yaitu facebook, twitter. Jenis media sosial yang lain yaitu media sosial untuk layanan musik dan video ada yotuube, gotube dll. Jenis-jenis media sosial ini memiliki fungsi yang sama yaitu dapat saling berkomunikasi atau berpendapat. Seorang musisi biasanya akan mengunggah karyanya pada youtube untuk dapat dinikmati masyarakat luas dan promosi.

Sejarah perkembangan media sosial yang digunakan untuk menikmati music berawal dari ditemukannya gramophone beserta dengan piringan hitam yang diputar, setelah itu perkembangan selanjutnya ditemukannya kaset pita yakni sebuah pita yang panjang tergulung-gulung berisi alunan music dan lagu. Kemudian karet pita berkembang menjadi teknologi compact disk atau CD lalu berkembang menjadi format mp3 hingga pada saat ini berkembang menjadi streaming media digital yang bisa diakses semua kalangan masyarakat melalui ponsel pintar mereka dengan syarat online atau tersambung internet, musik dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun tanpa alat yang rumit, contoh platform media sosial berupa Youtube yang tidak hanya menyediakan streaming video musik tetapi juga menjadi media promosi bagi para musisi. Kemajuan di bidang teknologi media sosial mempermudah para musisi dan masyarakat untuk menikmati sebuah lagu. Sebelumnya musisi mempromosikan lagunya menggunakan compact disk atau CD sedangkan saat ini, menggunakan streaming digital yang dapat menjangkau lebih luas.[[44]](#footnote-44)

Perubahan gaya hidup atau kebiasaan masyarakat menandakan bahwa adnaya kemajuan teknologi yang meningkat pesat. Transformasi era 4.0 merupakan transformasi atau perubahan mengenai layanan, desain produk, operasi, manufaktur, teknologi dan lain-lain dengan waktu yang cepat. Perubahan yang cepat ini memiliki dampak positif dan negatif di berbagai negara termasuk Indonesia. Hubungan antara revolusi 4.0 dengan industri musik adalah revolusi 4.0 akan menjadi tren para musisi Indonesia untuk mempromosikan lagunya melalui media online atau streaming digital contohnya di youtube sehingga masyarakat dapat menikmatinya dan musisi dapat menggapai seluruh individu di belahan dunia manapun. Hubungan ini tentunya menjadi symbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan baik musisi dan masyarakat.

Youtube ialah sebuah platform maupun aplikasi yang menjadi salah satu aplikasi yang direkomendasikan hingga terpasang otomatis pada telepon pintar atau *smartphone*. Aplikasi youtube ini terinstal pada *smartphone* dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis dengan syarat tersambung dengan jaringan internet. Youtube kerapkali sudah dianggap telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui media platform Youtube masyarakat dapat menonton berbagai konten yang dibuat oleh para pembuat koten. Youtube dijadikan sebagai media sosial yang memberikan informasi melalui tampilan video. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengupload video berbagai macam tema disesuaikan dengan regulasi yang dibuat oleh platform Youtube. Video yang diunggah pada platform Youtube bisa dilihat, dan dinikmati oleh semua orang di belahan dunia sehingga menjadikan youtube sebagai platform yang aktif dan efektif untuk memasarkan suatu karya video. Sehingga youtube memiliki kelebihan yaitu dapat dengan efektif menyampaikan informasi atau konten berupa video dengan cepat dan mudah dengan topik yang bervariasi dan up to date kepada masyarakat luas di semua negara.[[45]](#footnote-45)

Akses media sosial mengalami penurunan sebesar 3 % dari tahun 2020 sebanyak 76% menjadi 73% di tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan, media sosial tetap mendominasi akses masyarakat. Berikut adalah urut-urutan peringkat akses media sosial: WhatsApp sebesar 95,9%, Facebook sebesar 80,4%, YouTube sebesar 72,2%, Instagram sebesar 46,4%, Tiktok sebesar 29,8%, Telegram sebesar 15,9%, Twitter 8,9% dan Line 4,5%.[[46]](#footnote-46) Meskipun proporsi penggunaan media sosial sedikit menurun dari tahun 2020 hingga 2021, media sosial masih mendominasi sebagai platform komunikasi. WhatsAp tetap menjadi yang paling banyak diakses, diikuti oleh Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, dan Line. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa media sosial masih yang paling banyak diakses oleh masyarakat untuk saranan edukasi, komunikasi, hiburan, promosi dan lain sebagainya.

* 1. **Dampak Positif Penggunaan Media Eletronik**

Media elektronik pada umumnya digunakan untuk mencari informasi, untuk medida hiburan, relaksasi, komunikasi dan lain sebagainya. Setiap individu dapat mengetahui budaya lain yang tidak sama, menghargai perspektif yang berbeda, mendapatkan ide serta ajang promosi hasil kreatifitas seseorang. Manfaat lain yang didapat dari penggunaan media elektronik adalah menawarkan jaminan keamanan, dukungan sosial, serta dukungan keselamatan dari penggunaan alat komunikasi tersebut. Dengan adanya media elektronik masyarakat dapat memperoleh berita yang sedang viral, informasi sesuatu yang sedang terjadi di belahan dunia manapun serta bisa selalu *update* informasi apapun. Media elektronik membuat manusia ikut berperilaku modern karena akses media elektronik lebih cepat dan semakin berkembang sehingga semua informasi terbaru dapat diakses dengan mudah dan cepat.[[47]](#footnote-47) Dengan bantuan media elektronik, informasi terbaru dan berita dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dalam negeri dan mancanegara.

Dampak positif dari media elektronik adalah mempermudah komunikasi, sebagai bentuk kemajuan teknologi serta sebagai media penyebaran informasi. Media elektronik ada banyak jenisnya. Contohnya Hp, laptop serta media elektronik lainnya. Media elektronik ini berisi software atau aplikasi-aplikasi yang mendukung pekerjaan. Selain itu dampak positif dari media elektronik adalah dapat menghasilkan uang. Contohnya adalah pemanfaatan aplikasi Youtube pada aplikasi di Hp atau laptop. Setiap video yang diupload dan mendapat penonton yang banyak, maka pencipta video dapat menguangkan sesuai dengan ketentuan Youtube. Sehingga dengan kata lain dapat menjadi sumber mata pencaharian baru yaitu konten kreator.

Media elektronik dan media sosial saat ini bukan hanya sebagai sarana komunikasi melainkan sarana jual beli. Biasanya seseorang mempromosikan melalui media elektronik ataupun media sosial contoh whatsapp atau youtube yang nantinya akan diberi keterangan bahwa barang-barant tersebut dijual. Kemajuan teknologi ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dan berpikir modern atau mencari kesempatan dalam menggunakan media elektronik ataupun media sosial.

* 1. **Dampak Negatif Penggunaan Media Elektronik**

Media elektronik tentu mempunyai dampak negatif seiring dengan adanya dampak positif. Penggunaan media elektronik yang berlebihan dapat merusak mata dan kemampuan otak untuk berpikir. Penggunaan dengan waktu yang lama menjadikan seseorang kurang aktif dan adanya media elektronik mengurangi aktifitas sosial diluar rumah karena semua yang dibutuhkan ada pada media elektronik tersebut. Waktu tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan menggunakan media elektronik terlalu lama untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Pemikiran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh waktu menonton televisi. Televisi yang ditonton setiap hari akan mengakibatkan daya piker yang menurutn dan kurang kritis. Anak menjadi lebih pemalas untuk berinteraksi atau bermain diluar rumah Bersama teman-temannya sebagai aktifitas sosial secara nyata. Anak cenderung menjadi malas belajar dan berinteraksi sosial lebih suka bermain media elektronik seperti computer, tv atau hp.[[48]](#footnote-48)

Hp atau ponsel pintar yang sudah hamper semua orang memiliki media elektronik dapat berdampak buruk pada perkembangan anak. Anak akan cenderung kurang berkomunikasi, tidak dapat mengekspresikan diri, hingga kemampuan interaksi sosial yang kurang. Selain itu, konten kekerasan, pornografi maupun bentuk criminal lainnya yang tayang pada media elektronik dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku anak remaja yang belum dapat mencerna pesan dengan baik. Para remaja ditakutkan cenderung meniru apa yang ditonton oleh mereka hingga munculnya tawuran pelajar, pemerkosaan, pembulian dan hal negatif lainnya. Selain dampak negatif untuk kesehatan, media elektronik dapat mengakibatkan hal negatif pada mental. Media elektronik saat ini digunakan oleh smeua kalangan. Akses yang terbuka serta minimnya peran pemerintah terhadap pemblokiran situs negative dapat menyebabkan dampak buruk seperti maraknya kasus perjudian, kasus asusila, kasus bullying dan kasus lainnya. Bahkan tak jarang pelakunya adalah anak kecil. Pola pikir dan kesehatan dapat terganggu akibat penggunaan yang tidak bijak.

1. Ali Mahmudan, Pengguna Youtube Indonesia Terbesar Ketiga di Dunia pada 2022, 11 Mei 2022, 23 Oktober 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022> [↑](#footnote-ref-1)
2. Lely Halimah, *Musik dalam Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Dasar, 2 (2), 2016, <https://ejournal.upi.edu/index.php/eduhumaniora/article/view/2763/1803> [↑](#footnote-ref-2)
3. Murti Ningsih Tamnge, et al, *Analisis Makna Lagu Dalam Album Sarjana Muda Karya Iwan Fals*, Jurnal Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 2 (1), 2021,

   <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3628855> [↑](#footnote-ref-3)
4. Julian Nur Rohman, Jazimatul Husna, *Situs Youtube Sebagai Media Pemenuhan Kebutuhan Informasi: Sebuah Survei Terhadap Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Angkatan 2013-2015*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, 6 (1), 2017 : 171-180, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23037> [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali Mahmudan, Pengguna Youtube Indonesia Terbesar Ketiga di Dunia pada 2022, 11 Mei 2022, 23 Oktober 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022> [↑](#footnote-ref-5)
6. Rizky Alif Rachmansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Cover Lagu Yang Diunggah Di Platform YouTube*, 2017, <http://repository.untag-sby.ac.id/10575/31/Jurnal%20Penelitian.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 (3), 2020 : 553-578, DOI : [10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578) [↑](#footnote-ref-7)
8. Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 (3), 2020 : 553-578, DOI : [10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578) [↑](#footnote-ref-8)
9. Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 (3), 2020 : 553-578, DOI : [10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578) [↑](#footnote-ref-9)
10. Lisa Ikhsana, Kasus Antara Tri Suaka dengan Andika Kangen Band: Bagaimana Ketentuan Pembayaran Royalti di Indonesia?, 14 Mei 2022, 23 Oktober 2023, <https://heylaw.id/blog/kasus-antara-tri-suaka-dengan-andika-kangen-band-bagaimana-ketentuan-pembayaran-royalti-di-indonesia> [↑](#footnote-ref-10)
11. Ilham Shidqi Nurrahmadi,. Dhani vs Once dan Jalan Panjang Penegakan Royalti di Indonesia, 8 Mei 2023, 23 Oktober 2023, <https://tirto.id/dhani-vs-once-dan-jalan-panjang-penegakan-royalti-di-indonesia-gE4S>   
      
     [↑](#footnote-ref-11)
12. Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Bureaucracy Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2 (1), 2022: 108-118, DOI:[10.53363/bureau.v2i1.17](http://dx.doi.org/10.53363/bureau.v2i1.17) [↑](#footnote-ref-12)
13. Febri Noor Hediati, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Royalti Atas PP Nomor 56 Tahun 2021*, KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 20 (1), 2022:49-60, DOI:[10.37090/keadilan.v20i1.603](http://dx.doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.603) [↑](#footnote-ref-13)
14. Karel Martinus Siahaya, Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021,* Kajian Hasil Penelitian Hukum,6 (1) 2022: 246-256, DOI:[10.37159/jmih.v6i1.1680](http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i1.1680) [↑](#footnote-ref-14)
15. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107, <https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=y_QrEAAAQBAJ&redir_esc=y> [↑](#footnote-ref-15)
16. Achmad Irwan Hamzani, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum, 2020, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52, <https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_penelitian_hukum.html?id=M3b3NAAACAAJ&redir_esc=y> [↑](#footnote-ref-17)
18. F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, 2007, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukim Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242. [↑](#footnote-ref-19)
20. Triatmojo, Frimandanu, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Pekalongan : PT. NEM, 2021, hlm 4 [↑](#footnote-ref-20)
21. Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 (3), 2020 : 553-578, DOI : [10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578) [↑](#footnote-ref-21)
22. Sanusi, Ervin Hengki Prasetyo, & Moh Taufik. (2024). *Implications Of Legal Protection Of Intellectual Property Rights For Obtaining Economic Benefits*. International Journal of Law and Society, *1*(3), 197–215. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.90 [↑](#footnote-ref-22)
23. Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku DiIndonesia*, Bureaucracy Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2 (1), 2022: 108-118, DOI:[10.53363/bureau.v2i1.17](http://dx.doi.org/10.53363/bureau.v2i1.17) [↑](#footnote-ref-23)
24. Triatmojo, Frimandanu, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Pekalongan : PT. NEM, 2021, hlm 1 [↑](#footnote-ref-24)
25. Sanusi, Ervin Hengki Prasetyo, & Moh Taufik. (2024). *Implications Of Legal Protection Of Intellectual Property Rights For Obtaining Economic Benefits*. International Journal of Law and Society, *1*(3), 197–215. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.90 [↑](#footnote-ref-25)
26. Makkawaru Zulkifli, Kamsilaniah, Almusawir, *Op. cit.*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-26)
27. Kanti Rahayu, *Kajian Tentang Hukum Fungsi Sosial Hak Cipta (Copyleft) di Indonesia*, Jurnal Diktun, 5 (2), 2017 :34-35, DOI:[10.24905/diktum.v9i2.92](http://dx.doi.org/10.24905/diktum.v9i2.92) [↑](#footnote-ref-27)
28. Makkawaru Zulkifli, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek,* Sukabumi: Farha Pustaka, 2021, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-28)
29. Rudi Ferdiansah, Prinsip-prinsip HAKI, 27 September 2022, 9 Desember 2023, https://greenpublisher.id/blog/prinsip-prinsip-haki/ [↑](#footnote-ref-29)
30. Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 (3), 2020 : 553-578, DOI : [10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578) [↑](#footnote-ref-30)
31. Adam Tri Awan, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta, Pancasakti Law Journal (PLJ), 1 (2), 2023 : 335-344, DOI : https://doi.org/10.24905/ plj.v1i2.34 [↑](#footnote-ref-31)
32. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-32)
33. Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 (3), 2020 : 553-578, DOI : [10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578) [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid [↑](#footnote-ref-34)
35. Adam Tri Awan, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta, Pancasakti Law Journal (PLJ), 1 (2), 2023 : 335-344, DOI : https://doi.org/10.24905/ plj.v1i2.34 [↑](#footnote-ref-35)
36. Triatmojo, Frimandanu, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Pekalongan : PT. NEM, 2021, hlm 39 [↑](#footnote-ref-36)
37. Kurnia Nadia, Perbedaan Royalti Musik dari Spotify dan Youtube, 22 Juni 2023, 10 Desember 2023, https://www.idxchannel.com/ecotainment/perbedaan-royalti-musik-dari-spotify-dan-youtube-mana-yang-bayar-lebih-tinggi [↑](#footnote-ref-37)
38. Rahmad Fauzan, Siap-Siap! Royalti Cover Lagu di YouTube Bakal Diatur,15 April 2021, 19 Desember 2023, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210415/12/1381711/siap-siap-royalti-cover-lagu-di-youtube-bakal-diatur [↑](#footnote-ref-38)
39. Kurnia Nadia, Perbedaan Royalti Musik dari Spotify dan Youtube, 22 Juni 2023, 10 Desember 2023, https://www.idxchannel.com/ecotainment/perbedaan-royalti-musik-dari-spotify-dan-youtube-mana-yang-bayar-lebih-tinggi [↑](#footnote-ref-39)
40. Surya, *Media Elektronik Sumber Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.5 [↑](#footnote-ref-40)
41. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-41)
42. Ridini, *Penggunaan Media Elektronik sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid- 19,* JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11 (2), 2022 : 137-143,  <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i2.2475> [↑](#footnote-ref-42)
43. Liedfray, Tongkotow, Fonny J Wanni, Jouke J Lasut, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara,* Jurnal Ilmiah Society 2 (1) 2022,  <https://doi.org/10.27166/jisip.v11i2.2355> [↑](#footnote-ref-43)
44. Yus Rizal Muhammad dan Abdul Rachman, *Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Karya Musik Di Era Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Band Sendau Gurau Di Semarang),* Musikolastika Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik, 2 (1), 2020 : 23-30,https://doi.org/10.7592/musikolastika.v2i1.35 [↑](#footnote-ref-44)
45. Yus Rizal Muhammad dan Abdul Rachman, *Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Karya Musik Di Era Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Band Sendau Gurau Di Semarang),* Musikolastika Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik, 2 (1), 2020 : 23-30,https://doi.org/10.7592/musikolastika.v2i1.35 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ali Mahmudan, Pengguna Youtube Indonesia Terbesar Ketiga di Dunia pada 2022, 11 Mei 2022, 23 Oktober 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022> [↑](#footnote-ref-46)
47. Yus Rizal Muhammad dan Abdul Rachman, *Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Karya Musik Di Era Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Band Sendau Gurau Di Semarang),* Musikolastika Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik, 2 (1), 2020 : 23-30,https://doi.org/10.7592/musikolastika.v2i1.35 [↑](#footnote-ref-47)
48. Yus Rizal Muhammad dan Abdul Rachman, *Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Karya Musik Di Era Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Band Sendau Gurau Di Semarang),* Musikolastika Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik, 2 (1), 2020 : 23-30,https://doi.org/10.7592/musikolastika.v2i1.35 [↑](#footnote-ref-48)